

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

Nur Azlina

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Riau, Pekanbaru*

Ira Amelia

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Riau, Pekanbaru*

Abstract

This purpose of this research is to examine the effect Good Governance and Internal Control on Government Performance at Pelalalawan Regency. The population in this study is middle and bottom managers at SETDA Pelalawan Regency. Data that is used in this research is primary data, that was collected by survey techniques by distributing questionnaires. Linear regression analysis was used as the method of analysis. The results of this research showed all variables are valid, reliable and fullfil classic assumption. The result of hypotheses analysis show that Good Governance and Internal Control have positive and significance effect on on government performance at Pelalawan Regency

Keywords: *good governance, internal control, local government performance.*

1. PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*. Menurut Arie Soelendro (2000:13), dalam Arja Sadjiarto (2000) unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di

berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik (*publik service*) bukan untuk memaksimalkan laba (Bastian, 2006). Tetapi sampai sekarang, kita sering belum tahu seperti apa sesungguhnya pelayanan yang akan diterima rakyat sebagai warga Negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik (Syafiie, 2008). Dalam era reformasi sekarang ini isu tentang pemberian pelayanan publik semakin mencuat kepermukaan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat keberadaban manusia yang semakin maju, dimana pemberian pelayanan yang baik oleh lembaga atau instansi pemberi pelayanan merupakan kata kunci yang tidak bisa ditawar lagi (Jonathan, 2004). Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik : (1) Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum. (2) Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat. (3) Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Penelitian mengenai *good governance* sebelumnya diteliti oleh pratolo (2006) yang meneliti mengenai pengendalian intern, komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* menemukan bahwa lemahnya pengendalian manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja. Menurut soleman (2007) yang meneliti mengenai kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Samsudin (2005) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa di kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan, pelatihan, motivasi, pengalaman kerja, sikap loyal dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala desa di Kabupaten Katingan. Penelitian Tugiman (2000), menunjukkan komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok akan menciptakan organisasi/perusahaan yang *economy*, *effeciency*, dan *effectiveness* untuk menghasilkan *good corporate governance* dalam institusi, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi.

Aprilia (2008) meneliti tentang komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan Gaya kepemimpinan terhadap kinerja sektor publik pada KABAG dan KASUB Rokan Hilir, hasil antara komitmen, *good governance* dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja sektor publik. Trisnaningsih (2007) juga meneliti tentang independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor, hasil penelitiannya juga menunjukkan pemahaman *good governance* tidak berpengaruh langsung, kemudian untuk gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja auditor.

Kompyurini (2007) meneliti tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan *balance scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip *good corporate governance* mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, kemudian secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip *good corporate governance* berhubungan positive tetapi tidak begitu signifikan.

Kemudian Ulfa Fimela (2011) juga meneliti tentang *pengaruh good governance*, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada Kabupaten Kampar, hasil penelitiannya juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara *good governance*, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik. Dian Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern.

Selain *good governance*, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha & Frederick 2011:8).

Penelitian Tugiman (2000) mengenai pengaruh peran auditor intern serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan disimpulkan bahwa manajemen puncak sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Dengan pengendalian intern yang baik maka tercipta organisasi/perusahaan yang *economy*, *efficiency* dan *effectiveness* untuk menciptakan *good governance* dalam institusi yang pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi.

Dalam penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (survey pada rumah sakit di Jawa Timur) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan *good governance* terhadap kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, juga pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang pada umumnya masih belum tertib. Hal ini tampak dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih sedikit yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ternyata sebagian besar masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), disclaimer dan bahkan ada yang advers (tidak wajar).

Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum mampu mengelola dan menatausahaan penambahan seluruhnya dirinci sesuai rincian akun Aset Tetap, belum didukung dengan pencatatan yang memadai, belum memasukkan aset hibah, dan belum mengeluarkan aset-aset yang rusak, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, seperti tidak didukung oleh Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris, dan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang. Selain itu, penyajian nilai aset belum seluruhnya menggunakan harga perolehan. Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI. Kemudian BPK RI juga menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Munculnya konsep GG di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan *stakeholder*-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih, 2007).

2.2 Pengendalian Intern

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut : “ Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu

perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan”.

Berkenaan dengan komponen atau unsur pokok pengendalian intern, COSO dalam Jusup (2001: 257); Messier (2000: 188), mengatakan bahwa pengendalian intern mempunyai 5 komponen yaitu :

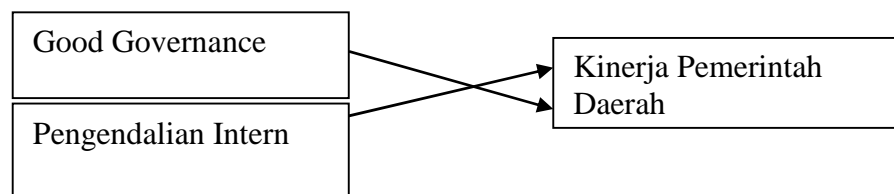
- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penafsiran resiko
- c. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
- d. Aktivitas pengendalian
- e. pemantauan

2.3 Kinerja (*Performance*)

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005:15).

2.4 Model Penelitian



Gambar 2.1. Model Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka hipotesisi penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

Ha₁: *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Ha₂: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Responden pada penelitian ini adalah aparat pemerintah yang ada dibawah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dengan jabatan eselon III dan IV dengan pertimbangan bahwa pejabat

tersebut setingkat dengan low dan midle manajer yang secara teknis terlibat dalam penilaian kinerja dan penentuan kebijakan-kebijakan di pemerintahan.

3.2 Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu berupa kuesioner. Data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjabat sebagai kepala, sekretaris, dan kepala bagian di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Pelelawan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung ke seluruh kantor SKPD Kabupaten Pelalawan dan memberikan kuesioner, yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu kepala dinas, sekretaris, dan kepala bagian di seluruh SKPD Kabupaten Pelalawan. Kemudian responden memilih salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan opininya.

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukurannya

1. *Good Governance*

Governance yang diukur dengan menggunakan empat indikator variabel yaitu : dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta pertanggung jawaban. Pertanyaannya diukur dengan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

2. *Pengendalian Intern*

Berkenaan dengan komponen atau unsur pokok pengendalian intern, COSO dalam Messier (2000:188), mengatakan bahwa pengendalian intern mempunyai 5 (lima) komponen yaitu : (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penafsiran resiko, (3) Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, (4) Aktifitas pengendalian, (5) Pemantauan. Pengendalian intern diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Prasetyono (2007). Instrumen tersebut terdiri dari 30 butir pertanyaan mengenai informasi yang berhubungan dengan pengendalian intern, dengan menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju).

3. *Kinerja Pemerintah*

Kinerja pemerintah meliputi penilaian tentang pencapaian PAD, belanja rutin dan belanja pembangunan yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2001) dan kuesioner telah disesuaikan dengan sistem penganggaran di Indonesia. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala Likert yang dimulai dari skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 menunjukkan sangat setuju.

3.5 Metode Analisis Data

Hasil penelitian atau kesimpulan yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil kesimpulan tergantung pada kualitas data dan variabel yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.6 Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Uji kualitas data yang dilakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Wijaya, 2012). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

3.7 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (good governance dan pengendalian intern) terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah Daerah). Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kinerja Pemerintah Daerah
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂ ,	=	Koefisien Regresi
x ₁	=	Good Governance
x ₂	=	Pengendalian Intern
e	=	Galat (<i>error terms</i>)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Kuesioner disebarkan pada 32 satuan kerja perangkat daerah kabupaten pelalawan. Dari 128 kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang kembali sebanyak 126 kuesioner (98.4375%),.

4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data

Dalam penelitian ini untuk semua variabel (kinerja pemerintah, good governance, pengendalian intern) dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel independen (good governance, pengendalian intern, dan budaya organisasi), diperoleh hasil *cronbatch alpha* lebih besar dari 0.6 (0.905, 0.841, 0.815) yang berarti bahwa data tersebut reliabel

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas serta bebas dari autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.440	4.626		.527	.599
	GG	.999	.107	.561	9.361	.000
	PI	.769	.115	.403	6.691	.000

Sumber : Pengolahan Data

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengolahan data terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9.361 > 1.98$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan adalah terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila pelaksanaan good governance pada pemerintah daerah kabupaten pelalawan dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis pertama mendukung hasil penelitian Prima Yuda (2012) yang menunjukkan bahwa variabel good governance dan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono & Kompyurini (2007) ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung antara pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang mana akuntabilitas publik termasuk didalamnya, terhadap kinerja organisasi. Hasil ini juga memperkuat penelitian Aprilia (2008) dan Ulfa (2011) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel good governance dalam meningkatkan kinerja sektor publik.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah. Hasil pengolahan data terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6.691 > 1.98$, dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten pelalawan adalah terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua mendukung hasil penelitian Prasetyono & Kompyurini (2007) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja RSUD. Begitu juga dengan Prima Yuda (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Hiro Tugiman (2000) yang menguji mengenai pengaruh peran auditor internal serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian internal dan kinerja perusahaan, menyatakan bahwa pengendalian intern perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis pertama mendukung hasil Prasetyono & Kompyurini (2007), penelitian Aprilia (2008), penelitian Ulfa (2011) penelitian Prima Yuda (2012) ,
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis kedua mendukung hasil penelitian Prasetyono & Kompyurini (2007) dan Prima Yuda (2012)

5.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian dan menambahkan variabel seperti komitmen, motivasi, dan gaya kepemimpinan .Hal ini diperlukan untuk meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Arisanti,Herlin.2010. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 9, No. 2 Agustus 2010.
- Allen J, Natalie & Meyer, John P. 1990. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*. Vol 63
- Anthony, Robert & Govindarajan, Vijay. *Management Control System*. Jakarta:Salemba Empat.

- Aprilia, Rini, 2008. *Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Sektor Publik*. Skripsi Universitas Riau.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Elya Wati, Lismawati & Nila Aprilia. 2010. *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah*, Purwokerto : Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Fimela, Ulfa. 2011. *Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik*. Skripsi Universitas Riau.
- Ghozali, Imam., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harlie, M. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Vol. 11, No. 2, Oktober 2010.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Kurniawan, Bobby. 2008. *Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Intern, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi*. Skripsi Universitas Riau.
- Kemala, Dian. 2011. *Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik*. Skripsi Universitas Riau.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1, Mei 2006.
- Mulyawan, Budi. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Narmodo, Hernowo dan M. Farid. 2006. *Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri*. Skripsi Universitas Widyatama
- Nurjanah. 2008. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nur Azlina & Desmiyawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi. *Pekbis Jurnal*, Vol. 4, N0. 2, Juli 2012.
- Prasetyono dan Kompyurini Nurul. 2007. Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2 Des 2014*

- Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Simposium Nasional Akuntansi. IAI. Makassar.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Penerbit Mediakom. Yogyakarta.
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Pekbis Jurnal*, Vol. 3, No. 3, November 2011.
- Suparman. 2007. *Analisis Pengaruh Peran Kepemimpinan, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Trisnaningsih, Sri. 2003. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor : Motivasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 6, No. 2, Mei 2003.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Corporate Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*, Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta
- Wijaya, Toni. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20*. Penerbit Cahaya Atma. Jakarta.
- Yuda, Prima. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi*. Jurnal, Vol.1, No.40
- Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* Vol. 18, No. 1, Maret 2010

www.pelelawankab.go.id